

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sejak tahun 2000-an, pemerintah Indonesia telah banyak berinvestasi di bidang pendidikan anak usia dini, menghasilkan peningkatan yang besar pada jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di seluruh negeri (Adriany & Saefullah, 2015; Hasan, Hason, & Chang, 2013). Terlepas dari kemajuan ini, bagaimanapun, Adriany (2020) berpendapat bahwa model pembangunan PAUD yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar masih terbatas pada model ekonomi. Adriany (2020) juga menjelaskan bahwa latar belakang ini telah mengabaikan masalah yang lebih penting seperti misalnya permasalahan keadilan sosial. Fakta bahwa perspektif sumber daya manusia telah sangat mempengaruhi PAUD di Indonesia juga terbukti dalam indikator instrumen akreditasi, alat untuk mengevaluasi kualitas lembaga PAUD. Dari total 54 indikator, sebesar 31% sebanyak 17 indikator, menilai kinerja perkembangan anak. Indikator ini menunjukkan metode untuk mengukur kualitas pendidikan hanya sebagai hasil dari pencapaian tanpa mempertimbangkan garis awal yang berbeda dari masing-masing anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa instrumen akreditasi di Indonesia lebih mengutamakan mengevaluasi kualitas pendidikan dari hasil anak, dari pada mengevaluasi proses input pendidikan berkualitas yang diperoleh lembaga pendidikan. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan perspektif sumber daya manusia, yang memandang anak sebagai alat untuk berinvestasi pada masa depan Negara, dan bukan mengakui nilai-nilai anak itu sendiri serta memberi anak hak untuk menerima pendidikan berkualitas tinggi.

Banyak penelitian melaporkan bahwa anak-anak yang telah menjalani program PAUD berkualitas tinggi berbeda dalam keterampilan kognitif, bahasa dan sosial. Keterampilan pada anak-anak tersebut berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang pernah mengikuti program berkualitas rendah

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(American Federation of Teachers, 2002; Barnett, Lamy, & Jung, 2005; Melhoish, 2007; Syva, 2007). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan berkembang dengan baik tanpa memandang jenis kelamin, agama, orang tua atau latar belakang sosial ekonomi keluarga. Maka dalam penelitian ini, instrumen akreditasi yang menjadi standar akreditasi dianalisis dari perspektif keadilan sosial untuk menilai kualitas faktor proses untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu kepada semua anak yang garis awalnya berbeda-beda, daripada mengevaluasi hasil belajar anak.

Berdasarkan hasil analisis, faktor kualitas relevansi baik di Indonesia maupun Korea Selatan adalah 14,6% dari total indikator di Indonesia dan 57,6% dari total indikator di Korea Selatan. Di Indonesia, merupakan fenomena penting bahwa indikator relevansi, terutama yang terkait dengan masyarakat, ditemukan lebih dari indikator instrumen Korea Selatan sementara faktor keadilan sosial dari partisipasi dan inklusi sebagian besar tidak tercermin dalam indikator instrumen. Hal ini tampaknya terkait dengan ideologi nasional yang menghormati berbagai budaya dan bangsa serta melindungi budayanya sendiri, seraya mengajarkan konsep pendiri Pancasila sebagai satu dalam perbedaan. Selain itu, setelah melakukan analisis, peneliti menemukan bahwa indikator akreditasi terkait pelanggaran diskriminasi latar belakang anak terkait unsur inklusi juga tercermin secara seimbang dalam indikator akreditasi kedua negara. Namun, pada instrumen akreditasi Indonesia, faktor-faktor inklusi dan partisipasi dalam keadilan sosial, seperti pemberian hak pengambilan keputusan kepada anak, melindungi dan memberikan dukungan individu untuk penyandang disabilitas dan anak rentan, menyediakan program tingkat demi tingkat untuk menghormati keragaman dan individualitas anak, masih sangat kurang. Persamaan lainnya adalah pada kedua instrumen akreditasi menunjukkan sedikitnya indikator yang berhubungan dengan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kerja sama masyarakat dalam menerapkan sistem akreditasi untuk meningkatkan kualitas PAUD sangat penting dan harus didukung oleh sektor swasta dan publik.

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Secara khusus, sistem dukungan yang efektif untuk pendanaan oleh pemerintah dan masyarakat bagi lembaga-lembaga miskin dengan garis awal yang berbeda dan peningkatan kualitas lembaga harus disediakan dan tercermin dalam instrumen akreditasi untuk memeriksa apakah hal ini diikuti dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan perbedaan terbesar antara kedua negara adalah bahwa faktor partisipasi dan inklusi terdapat pada dua indikator instrumen akreditasi IPA Indonesia, yang secara signifikan yaitu sebesar 3,7% dari total. Di sisi lain, melalui analisis ditemukan bahwa dimensi inklusi termasuk dalam 54,2% dari total indikator penilaian dalam instrumen akreditasi dan Korea Selatan, dan 25,4% ditemukan dalam dimensi partisipasi. Selain itu, kualitas keadilan sosial yang ditunjukkan pada indikator instrumen akreditasi di Indonesia tercermin pada 5 Standar dari 8 Standar, dan faktor kualitas keadilan sosial didistribusikan secara merata pada 4 area pada instrumen akreditasi Korea Selatan.

Di antara perbedaan kedua negara tersebut, indikator terkait anak, guru, masyarakat, lingkungan, dan orang tua terutama guru, lingkungan, dan orang tua, sangat berbeda dalam tingkat refleksi faktor keadilan sosial di kedua negara. Secara khusus, 16 indikator dari total 59 indikator pada instrumen akreditasi Korea Selatan diperlukan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru, seperti kepemimpinan kepala sekolah, lingkungan kerja guru dan staf, perlakuan dan kesejahteraan guru dan staf, dan profesionalisme guru dan staf. Sedangkan standar 4, bidang guru dan staf pada instrumen akreditasi Indonesia, terdiri dari indikator yang menilai tugas dan peran guru, bukan indikator evaluasi untuk penguatan kompetensi guru, 1 indikator dari total 54 indikator evaluasi. Faktor kualitatif keadilan sosial lingkungan juga tercermin pada 14 indikator dari total 59 indikator pada instrumen akreditasi Korea Selatan dan 1 indikator dari total 54 indikator pada instrumen akreditasi Indonesia. Secara khusus, terlepas dari pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kualitas pendidikan dengan mendorong keinginan guru untuk bekerja, dan memungkinkan

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

guru untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal, sayangnya instrumen akreditasi Indonesia tidak dapat menemukan indikator penilaian terkait. Faktor kualitas keadilan sosial yang terkait dengan orang tua tercermin pada 8 indikator dari total 59 indikator pada instrumen akreditasi Korea Selatan dan 1 indikator dari 54 indikator pada instrumen akreditasi Indonesia. Dari perspektif keadilan sosial, orang tua harus memiliki tanggung jawab bersama atas pendidikan dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan dan lembaga harus mencerminkan pendapat dan keadaan orang tua anak baik dalam kurikulum ataupun dalam perencanaan program (Linda, 2002; Tilky, 2007). Untuk mencapai hal tersebut, lembaga hendaknya secara aktif meminta pendapat orang tua dan merefleksikannya dalam operasional lembaga. Sayangnya, faktor-faktor tersebut tidak ditemukan dalam indikator instrumen akreditasi Indonesia, begitupun dengan indikator Korea Selatan juga kurang memiliki panduan tentang di bidang apa pendapat orang tua sebenarnya tercermin dibandingkan dengan indikator lainnya. Perbedaan terakhir antara kedua negara yaitu pada instrumen akreditasi Korea Selatan, instrumen akreditasi dan pedoman penilaian detail untuk persiapan akreditasi disediakan secara terbuka kepada lembaga dan guru. Tetapi di Indonesia, instrumen akreditasi yang digunakan oleh para asesor selama kunjungan belum disediakan secara terbuka kepada lembaga dan guru. Secara hasil komprehensif dari penelitian ini, tingkat refleksi dari faktor kualitas keadilan sosial dalam instrumen akreditasi Indonesia secara signifikan lebih sedikit.

Namun ironisnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan keadilan sosial sebagai ideologi nasional yang penting sejak didirikan pada tahun 1945. Terdapat lima ideologi nasional dalam ideologi nasional Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila secara langsung merujuk pada perwujudan keadilan sosial, serta dimensi-dimensi dari keadilan sosial, seperti penghormatan terhadap manusia, pengakuan akan keberagaman, partisipasi dan demokrasi, tercermin secara merata dalam ideologi nasional sebagaimana yang terkandung dalam ketetapan MPR Nomor 18 tahun 1998 dan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Pemerintah Republik Indonesia, 1998; 1945). Meskipun sejarah yang panjang ini,

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

bagaimanapun (Hadad & Cominos, 1989; Eklof, 2004; Manullang, 2013) menunjukkan bahwa ideologi keadilan sosial Pancasila tidak benar-benar diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Konsep dasar suatu negara harus diterapkan di semua bidang. Untuk mencapainya ideologi keadilan sosial sebaiknya diterapkan secara praktis di semua bidang, termasuk pendidikan, agama, perawatan kesehatan, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan. Harus disiapkan pedoman khusus sesuai bidang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis konten yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberi rekomendasi terkait instrumen akreditasi berdasarkan konsep keadilan sosial khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis konten yang dilakukan oleh peneliti, implikasi dari perspektif keadilan sosial yang berlaku untuk instrumen akreditasi lembaga dalam domain pendidikan secara universal serta instrumen akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan dijelaskan sebagai berikut,

Pertama, instrumen akreditasi harus mencerminkan unsur kualitatif keadilan sosial untuk anak (peserta didik) yang merupakan pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dengan kata lain, hal tersebut harus menjadi pertimbangan tambahan dalam indikator akreditasi. Seperti misalnya, apakah indikator akreditasi mempertimbangkan unsur suara anak pada kurikulum?, apakah lembaga telah memberikan anak kesempatan untuk membuat keputusan sendiri?, apakah guru mengakui keragaman dan perbedaan individu dari anak?, apakah guru ataupun lembaga memberikan dukungan tambahan yang sesuai dengan anak?, dan apakah lembaga menyediakan dukungan materil dan dukungan ahli untuk anak penyandang disabilitas dan kelompok sosial yang rentan?. Anak dengan garis awal yang berbeda tidak dapat diminta untuk memiliki pencapaian yang sama, tanpa adanya dukungan dan pertimbangan dari berbagai pihak. Jika ada area atau standar untuk menilai prestasi anak dalam instrumen akreditasi,

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

maka area atau standar tersebut harus mencakup juga dukungan apa yang telah disediakan untuk anak agar dapat mencapai prestasi yang diharapkan tersebut. Jika tidak, tidak mungkin untuk membedakan apakah hasil pencapaian anak disebabkan oleh kekhususan individu atau keadaan keluarga, atau itu berasal dari upaya kualitatif kelembagaan. Tanpa upaya seperti tersebut, tidak mungkin untuk mengharapkan tingkat pencapaian yang sama oleh anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, fisik dan budaya. Adriany (2020) menunjukkan bahwa karena neoliberalisme, tanggung jawab pendidikan berkualitas dialihkan ke lembaga pendidikan swasta. Akibatnya, ketimpangan sosial tersebar luas di dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah harus mengawasi dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk lembaga pendidikan sehingga anak dengan latar belakang sosial dan kemampuan individu yang beragam dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, bersama-sama.

Kedua, instrumen akreditasi harus mencerminkan unsur kualitatif keadilan sosial bagi guru yang merupakan utusan langsung pendidikan. Harus dievaluasi apakah suara guru tercermin dalam proses pengambilan keputusan penting dari lembaga pendidikan dan proses pembuatan kebijakan pendidikan nasional, dan apakah perbedaan individu guru diakui untuk menempatkan tugas yang sesuai dengan bakat pekerjaan guru, dan melakukan pendidikan berkelanjutan bagi guru agar dapat memperkuat kemampuan guru. Juga harus dievaluasi apakah lingkungan kerja, kondisi, perawatan dan sistem kesejahteraan didukung sehingga guru dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Osgood (2006), Newberry & Marpinjun (2018) dan Yulindrasari (2014), yang mengatakan bahwa sebagian besar guru pendidikan anak usia dini berjenis kelamin perempuan, dan gaji mereka jauh lebih rendah daripada kelompok pekerjaan yang lain, yang juga dapat diatasi sebagai masalah diskriminasi sosial dan seksual. Kualitas guru mengarah pada kualitas pendidikan. Pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan harus melakukan upaya yang cukup banyak untuk memperkuat kualitas guru, agar hal ini dapat mengarah pada pendidikan berkualitas sebelum mengevaluasi prestasi anak.

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Ketiga, instrumen akreditasi harus mencerminkan unsur kualitatif keadilan sosial yang terkait dengan masyarakat dan pemerintah yang memiliki tanggung jawab bersama atas kualitas pendidikan. Tanggung jawab untuk kualitas pendidikan tidak hanya pada institusi pendidikan individu. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh keluarga, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemerintah secara bersama-sama. Hasil analisis indikator akreditasi di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kedua instrumen akreditasi jarang mencerminkan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator akreditasi harus mencerminkan apakah pemerintah terus-menerus memeriksa kualitas lembaga pendidikan, mengirim para ahli untuk membantu jika peningkatan kualitas diperlukan, dan apakah sumber daya manusia dan dukungan materil di masyarakat digunakan untuk pendidikan.

Keempat, instrumen akreditasi harus mencerminkan faktor kualitatif keadilan sosial terkait dengan lingkungan, yang dapat disebut sebagai latar belakang kualitas pendidikan. Lingkungan yang aman dan nyaman membantu anak-anak berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan keingintahuan mereka, sehingga memberi mereka peluang dan hak pengambilan keputusan untuk berpartisipasi (Kwon & Lee, 2005; Yoo & Shim, 2014; Curtis, 2015). Oleh karena itu, indikator instrumen akreditasi harus mencerminkan apakah lingkungan pendidikan dijaga dengan aman dan nyaman, apakah tersedia ruang yang cukup untuk kegiatan internal dan eksternal serta alat pendidikan. Selain itu, lingkungan kerja bagi para guru mendorong para guru untuk bekerja dan meningkatkan kepuasan kerja untuk membantu mereka melakukan pendidikan yang berkualitas (Allen & Meyer, 1990; Jorde & Bloom, 1989; Konos & Stremel, 1988). Instrumen akreditasi juga harus mencerminkan apakah ruang kerja individu dan tempat istirahat untuk guru tersedia, apakah peralatan dan bahan pengajaran yang cukup, disiapkan untuk persiapan kelas, apakah ada ruang bagi guru untuk diskusi kelompok, dan apakah lingkungan kerja guru nyaman bagi guru. Selain itu, indikator instrumen akreditasi harus

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

mencerminkan faktor orang tua dan masyarakat seperti apakah materi pendidikan orang tua atau buku tersedia untuk orang tua, apakah tersedia ruang untuk diskusi individu atau kelompok dengan orang tua, apakah ruang untuk ruang tunggu orang tua atau pengunjung dan toilet dewasa tersedia. Dan jika terdapat kasus dimana lembaga tidak memiliki ruang yang cukup, maka lembaga harus memeriksa penggunaan ruang komunitas (tempat alternatif yang disediakan masyarakat) sebagai alternatif lainnya.

Kelima, instrumen akreditasi harus mencerminkan faktor kualitas keadilan sosial bagi orang tua yang merupakan wali anak. Sebagai wali langsung anak, orang tua harus dapat mengambil tanggung jawab bersama untuk pendidikan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan. Selain itu, komunikasi berkelanjutan dengan orang tua atau pengasuh harus dilakukan untuk memeriksa apakah ada anak dalam rumah tangga atau keluarga yang mengalami masalah atau yang ditinggalkan, serta untuk memberikan dukungan individu untuk orang tua. Untuk tujuan ini, indikator instrumen akreditasi harus mencakup apakah pendapat orang tua tercermin dalam rencana pendidikan lembaga, apakah lembaga mengetahui masalah anak melalui komunikasi yang berkelanjutan dengan keluarga secara individu, dan apakah lembaga memberikan dukungan individu untuk anak yang kurang mampu.

Akhirnya, faktor kualitas keadilan sosial harus tercermin dalam proses akreditasi untuk lembaga yang berpartisipasi dalam akreditasi. Ketidaksetaraan sosial juga ada dalam proses berpartisipasi dalam evaluasi akreditasi. Walaupun ada lembaga pendidikan dengan lingkungan fisik yang baik dan sumber daya manusia yang baik, namun ada cukup banyak lembaga yang enggan berpartisipasi dalam akreditasi karena lingkungan yang buruk dan kurangnya sumber daya (Asiah, 2018; Musa & Utilitarian, 2019; Nuryanto & Irmade, 2019). Ada juga lembaga yang secara aktif didukung dan diawasi oleh pemerintah daerah dalam proses persiapan untuk akreditasi, sementara ada juga beberapa lembaga yang takut mengambil akreditasi karena kurangnya informasi (Asiah, 2018; Musa & Utilitarian, 2019; Nuryanto & Irmade, 2019; Won 2020). Ini berarti bahwa garis



awal untuk lembaga yang mengikuti akreditasi juga beragam. Itulah sebabnya pemerintah harus memberikan pedoman dan informasi khusus untuk mempersiapkan akreditasi mandiri untuk lembaga-lembaga yang berada di belakang garis awal, dan memberikan dukungan material seperti dukungan finansial, pengadaan barang ataupun bantuan pembinaan dari ahli kepada lembaga-lembaga yang kurang mampu. Sebagai tambahan, tidak dimaksudkan untuk memberikan skor evaluasi pada kunjungan satu kali, tetapi untuk memberikan periode waktu yang cukup untuk mempersiapkan penilaian. Selain itu, kualitas pendidikan harus didukung agar dapat berkembang melalui proses persiapan untuk akreditasi, seperti inspeksi mandiri dan inspeksi sementara oleh pemerintah daerah.

Agar lembaga pendidikan meningkatkan kualitas melalui akreditasi oleh lembaga pendidikan, isi indikator akreditasi harus spesifik, obyektif, dan direvisi serta ditambah. Dengan kata lain, instrumen akreditasi harus secara khusus mencerminkan bagaimana kualitas pendidikan dalam hal keadilan sosial diwujudkan untuk berbagai perspektif dan subjek. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan bersama melalui komunikasi yang berkelanjutan dengan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, tidak hanya dengan bergantung pada lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas kualitas pendidikan. Ini sejalan dengan ideologi pendiri Indonesia tentang Gotong Royong (John, 1986). Penting juga untuk terus memeriksa dan merevisi bagaimana instrumen akreditasi mencerminkan dimensi kualitatif pendidikan keadilan sosial sesuai dengan waktu dan budaya negara.

Selain itu peneliti juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini membandingkan dan menganalisis indikator akreditasi PAUD Korea Selatan dan indikator akreditasi PAUD Indonesia dari perspektif keadilan sosial. Hal ini bertujuan untuk penyempurnaan instrumen akreditasi lembaga PAUD. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan bahwa perlu adanya penelitian kualitas indikator akreditasi dari perspektif yang lebih beragam.

Eunjung Won, 2020

Analisis Instrumen Akreditasi PAUD di Indonesia dan Korea Selatan Melalui Perspektif Keadilan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Kedua, dalam penelitian ini hanya indikator instrumen akreditasi yang dianalisis, namun perlu juga dianalisis proses akreditasi dan persepsi guru untuk mengetahui apakah instrumen akreditasi efektif dalam meningkatkan kualitas lembaga PAUD.

Ketiga, indikator instrumen akreditasi PAUD Korea Selatan dipilih dan dianalisis sebagai pembandingan dengan instrumen akreditasi PAUD Indonesia. Selanjutnya peneliti berharap terdapat penelitian yang meneliti dan menganalisis instrumen akreditasi PAUD di Amerika Serikat, Australia, dan negara lain yang telah melaksanakan sistem akreditasi dengan baik. Hal ini untuk meningkatkan dan mengembangkan indikator instrumen akreditasi PAUD yang efektif.